



RENCANA KERJA RENJA TAHUN 2024

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Barito Utara berhasil menyusun Rencana Kerja (Renja) Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 yang berlandaskan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.

Renja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 disusun melalui berbagai tahapan, mulai dari penyusunan rancangan awal Renja Bappeda Litbang, yang dilakukan penyempurnaan melalui pembahasan Renja pada internal Bappeda Litbang, kemudian dilanjutkan dengan penyesuaian rancangan Renja Bappeda Litbang mengacu rancangan RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 dan Penetapan Renja Bappeda Litbang oleh Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara.

Maksud disusunnya Renja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara adalah sebagai pedoman bagi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi institusi. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai alat pengendali manajemen yang praktis bagi pemberi amanah, sebagai tolok ukur kinerja untuk dasar evaluasi kinerja aparatur serta untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi kepada unit satuan kerja.

Dengan maksud untuk memperoleh hasil pembangunan daerah yang sinergi dan lebih komprehensif, disesuaikan dengan perkembangan terkini, diperlukan suatu proses perencanaan pembangunan daerah yang integrasi, partisipatif, berdaya saing serta mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat yang makin kompleks. Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara sebagai lembaga perencana program pembangunan di daerah perlu menyusun Renja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 yang juga merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

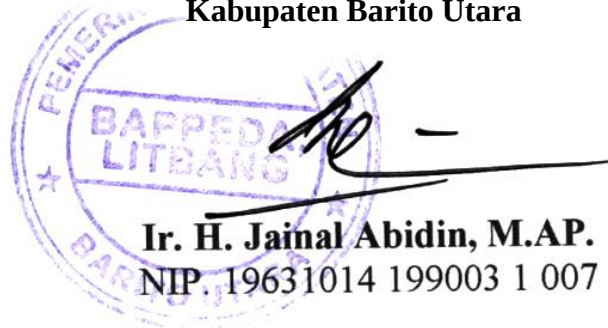
Dokumen Renja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai komitmen bersama bagi aparat perencanaan pada lintas bidang/fungsi/sektor serta dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas perencanaan pembangunan di daerah, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan yang selalu direncanakan

diharapkan mampu untuk menjembatani dan menyelaraskan antar sumber daya yang ada guna kemajuan pembangunan di Kabupaten Barito Utara.

Semoga Renja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Muara Teweh, Februari 2023

**Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Barito Utara**

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA" at the top and "BAPPEDA LITBANG" at the bottom, separated by two stars. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name and NIP of the official are printed.

Ir. H. Jainal Abidin, M.AP.
NIP. 19631014 199003 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
I.1. Latar Belakang	I-1
I.2. Landasan Hukum	I-2
I.3. Maksud dan Tujuan	I-6
I.4. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	II-1
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	II-1
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-21
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	II-24
II.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-27
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi	III-1
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-2
III.3 Program dan Kegiatan	III-5
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kinerja merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.

Berdasarkan Undang- Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap PD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana kerja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, dan Rencana strategis (Renstra) Bappeda Litbang yang selanjutnya Rencana Kerja tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bappeda Litbang Tahun Anggaran 2024 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD).

Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Barito Utara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2023 ini menyusun Renja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2024. Renja PD merupakan dokumen rencana pembangunan PD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan

RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh PD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan di daerah.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Renja Bappeda Litbang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisai Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Utara Tahun

- 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Barito Utara Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023;
 22. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Utara.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renja adalah sebagai pedoman bagi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi institusi.

Renja PD dibuat dengan maksud untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Merupakan alat pengendali manajemen yang praktis bagi pemberi amanah.
3. Merupakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
4. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Tujuan disusunnya Renja yaitu :

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bappeda Litbang Tahun 2024.
2. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada Bappeda Litbang Tahun Anggaran 2024.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Bappeda Litbang Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

BAB II. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

BAB III. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Renja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Ke V (lima) Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 yaitu: **“PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk Strategi. Sesuai dengan peran misi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Menerapkan Pelayanan Aparatur Bappeda Litbang yang Efektif dan Efisien;
2. Meningkatkan Kualitas Manajemen Organisasi Melalui Peningkatan Kapasitas Aparatur Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Database Bappeda Litbang;
3. Melaksanakan Penyusunan Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah secara Konsisten dan Akuntabel Berbasis IT;
4. Meningkatkan Pemanfaatan hasil Penelitian/Kajian dalam Pengambilan Kebijakan Daerah.

Dalam rangka mencapai visi dan strategi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2022, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**TABEL II.1 Program dan Kegiatan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara
Tahun Anggaran 2022**

KODE						PROGRAM/KEGIATAN
1						2
5.	01					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah
5	01	01	2	01	02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5	01	01	2	01	03	koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD
5	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5	01	01	2	01	05	koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD
5	01	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
5	01	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
5	01	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
5	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5	01	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

KODE						PROGRAM/KEGIATAN
1						2
5	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
5	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
5	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan
5	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
5	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	01	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah
5	01	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5	01	01	2	07	07	Pengadaan Aset tetap Lainnya
5	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	01	01	2	08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat
5	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5	01	01	2	08	04	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor

KODE						PROGRAM/KEGIATAN
1						2
5	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5	01	01	2	09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendara Dinas Jabatan
5	01	01	2	09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5	01	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel
5	01	01	2	09	07	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya
5	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
5	01	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5	01	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya
5	01	01	2	13		Penataan Organisasi
5	01	01	2	13	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan kinerja Pemerintah Daerah
5	01	02				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2	01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
5	01	02	2	01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
5	01	02	2	01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
5	01	02	2	01	07	Koordinasi Penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
5	01	02	2	02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2	02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan pembangunan Daerah
5	01	02	2	03		Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE						PROGRAM/KEGIATAN
1						2
5	01	02	2	03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2	03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
5	01	03	2	03	03	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
5	01	03				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2	01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5	01	03	2	01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5	01	03	2	01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan perangkat Daerah bidang pemerintahan
5	01	03	2	01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
5	01	03	2	02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
5	01	03	2	02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5	01	03	2	02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
5	01	03	2	02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
5	01	03	2	03		Koordinasi Perencanaan Bidang infrastruktur dan Kewilayahan
5	01	03	2	03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5	01	03	2	03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembanguna daerah Bidang Infrastruktur
5	01	03	2	03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

KODE						PROGRAM/KEGIATAN
1						2
5	01	03	2	03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
5	05	02				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	2	02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
5	05	02	2	02	01	Penelitian dan pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
5	05	02	2	02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
5	05	02	2	03		Penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
5	05	02	2	03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
5	05	02	2	03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, perkebunan dan Pangan
5	05	02	2	04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi
5	05	02	2	04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
Program						4 Program
Kegiatan						17 Kegiatan
Sub Kegiatan						57 Sub Kegiatan

Pengukuran Kinerja Bappeda Litbang didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian kinerja berikut:

TABEL II.2 Pengukuran Capaian Kinerja Bappeda Litbang Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2023)	Kategori Capaian
			Target	Realisasi	Persentase Capaian		
1	Persentase IKU Renstra perangkat daerah yang selaras RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	B
2	Persentase Renja perangkat daerah yang selaras Renstra	100%	100%	100%	100%	100%	B
3	Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD	58,76%	35%	30,34%	87%	40%	B
4	Persentase Hasil Litbang yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan	67%	67%	100 %	149,25%	100%	BS

Pada Tahun Anggaran 2022 alokasi Anggaran murni Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara sebesar Rp5.609.666.997,- dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp2.838.938.012,-, Belanja Barang dan Jasa Rp2.698.159.985,- dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp72.569.000,-. Pada bulan Januari, Bappeda Litbang Kab. Barito Utara.

Bappeda Litbang mendapatkan penambahan dana pada Perubahan Mendahului yang di sah kan pada tanggal 11 Juli 2022. Adapun penambahan pagu sebanyak Rp119.990.250,- pada Belanja Barang dan Jasa, sehingga menjadi Rp2.818.150.235,- dan

belanja Modal Peralatan dan Mesin bertambah sebesar Rp20.000.000,- menjadi Rp92.569.000,-.

Pada masa APBD Perubahan anggaran Bappeda Litbang mengalami penambahan pagu, adapun total penambahan tersebut adalah Belanja Bappeda Litbang Kab. Barito Utara menjadi Rp7.489.657.247,- dengan rincian Belanja Pegawai Menjadi Rp3.578.938.012,- Belanja Barang dan Jasa menjadi Rp3.166.786.135,- dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Menjadi Rp743.933.100,-.

1. Target Belanja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara

Target Belanja yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara dipersentasekan pada tabel berikut:

TABEL II.3 Realisasi Program dan Kegiatan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Tahun Anggaran 2022 (Desember)

KODE						PROGRAM KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL			
								PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
									Rp	(%)			Rp	(%)	
1						2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4* 100	7				
5	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,169,028,302	5,425,095,202	4,640,383,462	85.54	99.62				
5	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
5	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,403,498,012	3,403,498,012	2,672,357,880	78.52	100.00				
						Gaji pokok PNS/Uang Representasi	2,010,582,623	2,010,582,623	1,368,460,400	68.06	100.00				
						Tunjangan Keluarga	116,246,984	116,246,984	96,610,372	83.11	100.00				
						Tunjangan Jabatan	174,910,000	174,910,000	157,850,000	90.25	100.00				
						Tunjangan Fungsional Umum	35,570,000	35,570,000	28,220,000	79.34	100.00				
						Tunjangan Beras	83,860,560	83,860,560	60,325,860	71.94	100.00				
						Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16,286,452	16,286,452	7,772,129	47.72	100.00				
						Pembulatan Gaji	440,393	440,393	19,119	4.34	100.00				
						Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	796,900,000	796,900,000	786,550,000	98.70	100.00				

KODE						PROGRAM KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI					BELANJA MODAL			
								PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)		PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
									Rp	(%)				Rp	(%)	
1						2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4* 100	7					
						Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	168,701,000	168,701,000	166,550,000	98.72	100.00					
5	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19,764,000	19,764,000	16,413,500	83.05	100.00					
5	01	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2,135,000	2,135,000	1,670,000	78.22	100.00					
5	01	01	2	01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	3,101,000	3,101,000	3,101,000	100.00	100.00					
5	01	01	2	01	03	koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA- SKPD	3,550,000	3,550,000	3,550,000	100.00	100.00					
5	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4,180,500	4,180,500	1,295,000	30.98	100.00					
5	01	01	2	01	05	koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	5,293,500	5,293,500	5,293,500	100.00	100.00					
5	01	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,504,000	1,504,000	1,504,000	100.00	100.00					

KODE						PROGRAM KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL			
								PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
									Rp	(%)			Rp	(%)	
1						2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4* 100	7				
5	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	202,926,750	202,926,750	202,926,750	100.00	100.00				
5	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	198,480,000	198,480,000	198,480,000	100.00	100.00				
5	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2,081,750	2,081,750	2,081,750	100.00	100.00				
5	01	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1,233,000	1,233,000	1,233,000	100.00	100.00				
5	01	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,132,000	1,132,000	1,132,000	100.00	100.00				
5	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	131,750,000	131,750,000	127,970,700	97.13	100.00				
5	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	61,750,000	61,750,000	59,370,700	96.15	100.00				
5	01	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	70,000,000	70,000,000	68,600,000	98.00	100.00				

KODE						PROGRAM KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI					BELANJA MODAL			
								PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	
									Rp	(%)			Rp	(%)		
1						2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4* 100	7					
5	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,184,957,160	441,024,060	420,117,044	95.26	98.53	743,933,100.00	725,608,786.00	97.54	100.00	
5	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,200,000	15,200,000	15,157,500	99.72	100.00					
5	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	34,978,160	34,978,160	34,735,000	99.30	100.00					
5	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	275,433,100	-	-	-	-	275,433,100	266,778,886.00	96.86	100.00	
5	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27,586,900	27,586,900	27,339,500	99.10	100.00					
5	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	26,954,500	26,954,500	22,597,500	83.84	91.67					
5	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan	36,610,000	36,610,000	32,105,000	87.69	100.00					
5	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18,412,000	18,412,000	18,288,000	99.33	100.00					

KODE						PROGRAM KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL			
								PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
									Rp	(%)			Rp	(%)	
1						2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4* 100	7				
5	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	281,282,500	281,282,500	269,894,544	95.95	98.50				
5	01	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	-	-				
5	01	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	465,000,000	-	-	-	-	465,000,000	455,400,000	97.94	100.00
5	01	01	2	07	07	Pengadaan Aset Lainnya	3,500,000	-	-	-	-	3,500,000	3,429,900	98.00	100.00
5	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,035,827,280	1,035,827,280	1,026,051,820	99.06	100.00				
5	01	01	2	08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	4,300,000	4,300,000	4,300,000	100.00	100.00				
5	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127,757,280	127,757,280	122,871,820	96.18	100.00				
5	01	01	2	08	04	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	903,770,000	903,770,000	898,880,000	99.46	100.00				

KODE						PROGRAM KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL			
								PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
									Rp	(%)			Rp	(%)	
1						2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4* 100	7				
5	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	188,745,100	188,745,100	172,985,768	91.65	98.41				
5	01	01	2	09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendara Dinas Jabatan	8,000,000	8,000,000	3,161,000	39.51	100.00				
5	01	01	2	09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40,512,600	40,512,600	38,088,488	94.02	100.00				
5	01	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	3,000,000	3,000,000	-	-	-				
5	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	69,982,500	69,982,500	67,760,730	96.83	100.00				
5	01	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35,040,000	35,040,000	32,880,000	93.84	100.00				
5	01	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	32,210,000	32,210,000	31,095,550	96.54	100.00				
5	01	01	2	13		Penataan Organisasi	1,560,000	1,560,000	1,560,000	100.00	100.00				

KODE						PROGRAM KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL			
								PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
									Rp	(%)			Rp	(%)	
1						2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4* 100	7				
5	01	01	2	13	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan kinerja Pemerintah Daerah	1,560,000	1,560,000	1,560,000	100.00	100.00				
5	01	02				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	819,116,625	819,116,625	699,121,207	85.35	97.74				
5	01	02	2	01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	578,107,000	578,107,000	489,465,501	84.67	100.00				
5	01	02	2	01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	66,904,875	66,904,875	65,478,050	97.87	100.00				
5	01	02	2	01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	55,769,875	55,769,875	54,355,875	97.46	100.00				
5	01	02	2	01	07	Koordinasi Penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	455,432,250	455,432,250	369,631,576	81.16	100.00				
5	01	02	2	02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	63,997,500	63,997,500	55,338,359	86.47	100.00				

KODE						PROGRAM KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL			
								PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
									Rp	(%)			Rp	(%)	
1						2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4* 100	7				
5	01	02	2	02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan pembangunan Daerah	63,997,500	63,997,500	55,338,359	86.47	100.00				
5	01	02	2	03		Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	177,012,125	177,012,125	154,317,347	87.18	93.21				
5	01	02	2	03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	25,834,125	25,834,125	23,167,425	89.68	100.00				
5	01	03	2	03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	6,995,000	6,995,000	6,995,000	100.00	100.00				
5	01	03	2	03	03	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	144,183,000	144,183,000	124,154,922	86.11	91.67				
5	01	03				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	329,500,000	329,500,000	252,743,600	76.71	85.52				
5	01	03	2	01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	127,025,000	127,025,000	92,358,400	72.71	91.28				

KODE						PROGRAM KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL			
								PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
									Rp	(%)			Rp	(%)	
1						2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4* 100	7				
5	01	03	2	01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63,800,000	63,800,000	56,022,900	87.81	97.00				
5	01	03	2	01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan perangkat Daerah bidang pemerintahan	23,952,000	23,952,000	9,900,800	41.34	65.03				
5	01	03	2	01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	39,273,000	39,273,000	26,434,700	67.31	98.00				
5	01	03	2	02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	92,630,000	92,630,000	65,023,000	69.30	81.70				
5	01	03	2	02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	66,053,000	66,053,000	47,297,600	71.61	97.05				

KODE						PROGRAM KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL			
								PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
									Rp	(%)			Rp	(%)	
1						2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4* 100	7				
5	01	03	2	02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	18,203,000	18,203,000	11,688,000	64.21	75.05				
5	01	03	2	02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8,374,000	8,374,000	6,037,400	72.10	73.00				
5	01	03	2	03		Koordinasi Perencanaan Bidang infrastruktur dan Kewilayahan	109,845,000	109,845,000	95,362,200	86.82	83.59				
5	01	03	2	03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24,250,000	24,250,000	23,750,800	97.94	99.01				
5	01	03	2	03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur	20,000,000	20,000,000	17,687,500	88.44	96.05				

KODE						PROGRAM KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI					BELANJA MODAL			
								PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)		PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
									Rp	(%)				Rp	(%)	
1						2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4* 100	7					
5	01	03	2	03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50,595,000	50,595,000	44,383,900	87.72	96.05					
5	01	03	2	03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	15,000,000	15,000,000	9,540,000	63.60	88.00					
5	05	02				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	172,012,320	172,012,320	158,507,760	92.15	97.25					
5	05	02	2	02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	64,236,500	64,236,500	60,222,370	93.75	96.25					
5	05	02	2	02	01	Penelitian dan pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	28,216,500	28,216,500	27,760,102	98.38	100.00					
5	05	02	2	02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	36,020,000	36,020,000	32,462,268	90.12	92.50					

KODE						PROGRAM KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL			
								PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
									Rp	(%)			Rp	(%)	
1						2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4* 100	7				
5	05	02	2	03		Penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	61,193,820	61,193,820	56,218,822	91.87	98.00				
5	05	02	2	03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	61,193,820	61,193,820	56,218,822	91.87	98.00				
5	05	02	2	04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	46,582,000	46,582,000	42,066,568	90.31	97.50				
5	05	02	2	04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	46,582,000	46,582,000	42,066,568	90.31	97.50				
						TOTAL	7,489,657,247	6,745,724,147	5,750,756,029	85.25	99.24	743,933,100.00	725,608,786.00	97.54	100.00

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

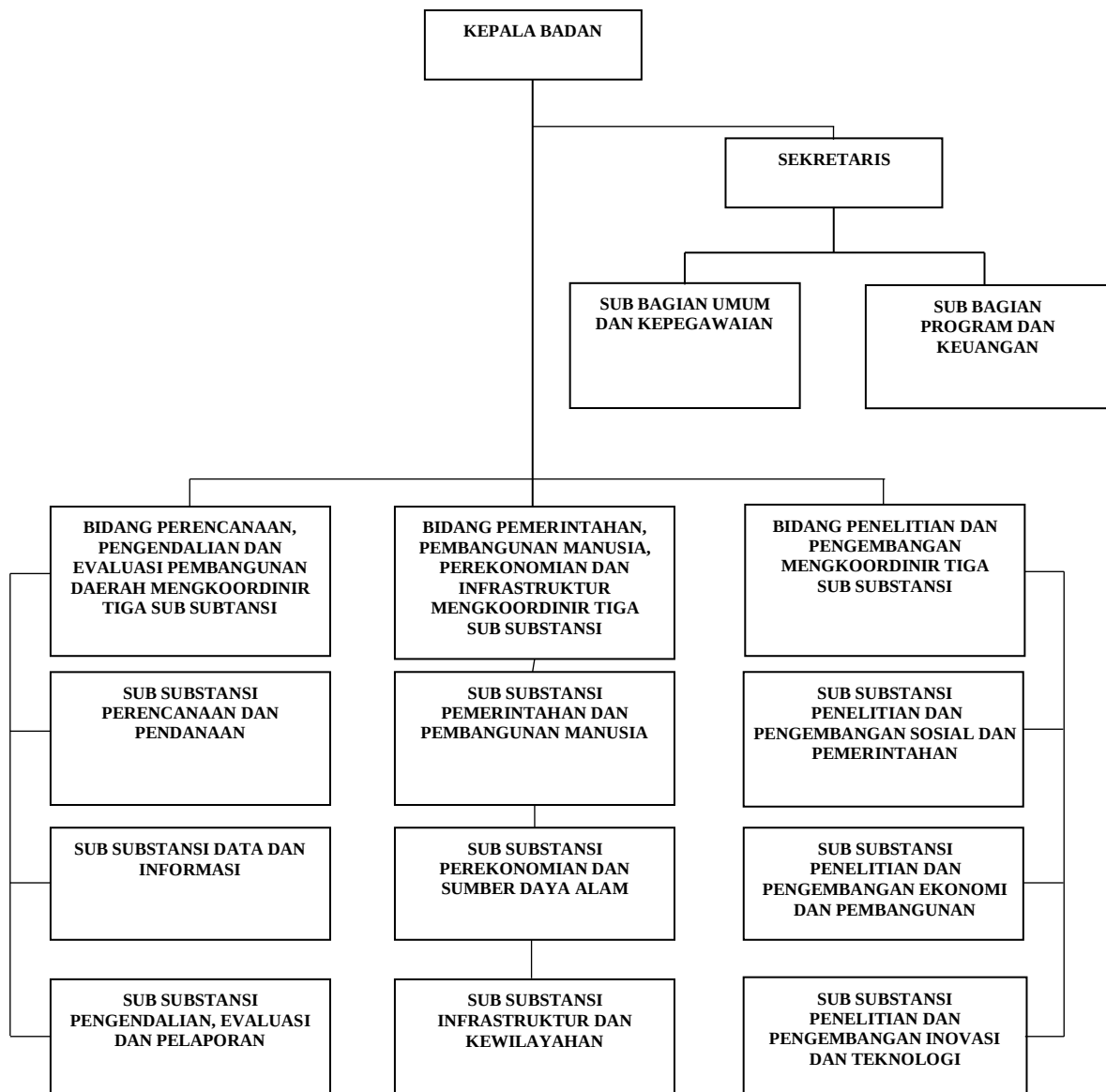
Analisis Kinerja pelayanan PD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD dengan kinerja yang dibutuhkan dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan PD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappeda Litbang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 1. Sub Subtansi Perencanaan dan Pendanaan.
 2. Sub Subtansi Data dan Informasi.
 3. Sub Subtansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur terdiri dari:
 1. Sub Subtansi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 2. Sub Subtansi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 3. Sub Subtansi Infrastruktur dan Kewilayahan
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
 1. Sub Subtansi Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan
 2. Sub Subtansi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan

3. Sub Subtansi Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Susunan Organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor : 35 Tahun 2022 sebagai berikut :



Permasalahan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list ke working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara yang membantu Bupati Barito Utara dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Barito Utara mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara.

2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;

II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas tertentu dibidang perencanaan Pembangunan Ekonomi, Fisik Prasarana, Sosial Budaya, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengendalian pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bappeda Litbang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan ekonomi, fisik prasarana, sosial budaya, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian.
- b. Pembinaan dan pelayanan umum dibidang perencanaan pembangunan bidang ekonomi, fisik prasarana, sosial budaya, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian.
- c. Pelaksanaan dan bimbingan teknis dibidang perencanaan pembangunan bidang ekonomi, fisik prasarana, sosial budaya, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian.
- d. Pembinaan urusan tata usaha badan.

Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

Sarana dan Prasarana

1. Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
4. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standar kelayakan kerja.

II. 4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Bappeda Litbang didiskusikan dalam pembahasan forum PD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada forum PD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda Litbang selaku PD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan PD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

III.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Pembangunan Nasional pada Tahun 2022 yang mengangkat tema **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.”** Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah, Yaitu **“Stabilitas Ekonomi dengan Penguatan SDM yang Berdaya Saing.”**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah meliputi bidang :

1. Infrastruktur,
2. Pendidikan,
3. Kesehatan dan
4. Perekonomian.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

A. TUJUAN

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi diatas, Bappeda Litbang menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

1. Peningkatan Tata Kelola Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Peningkatan Fungsi Kelitbang secara Optimal dan Proporsional dalam Pengambilan Kebijakan Daerah.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi V RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 yang berbunyi **“Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*)”**.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara. Dalam hal ini Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara diharapkan menjadi koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga Visi dan Misi pemerintah Kabupaten Barito Utara.

B. SASARAN

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Bappeda Litbang menetapkan 2 (dua) sasaran strategis :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
2. Meningkatnya persentase penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah.

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik, proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Akuntabilitas kinerja memiliki arti yang sangat penting dalam membangun budaya kinerja di lingkungan instansi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara. Budaya ini harus secara konsisten diterapkan melalui penerapan manajemen kinerja yang memfokuskan pelaksanaan tugas dan fungsi harus memberikan hasil yang bermanfaat bagi publik/masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peningkatan kinerja Bappeda Litbang berhasil jika target indikator sasaran tercapai sesuai yang di tetapkan. Proses pencapaian IKU Bappeda Litbang ini tidaklah mudah harus dimulai dengan meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan dan konsisten melakukan evaluasi hasil pelaksanaan rencana tersebut. Hasil evaluasi tersebut dapat mengukur sejauh mana kinerja Bappeda Litbang berhasil mencapai IKU-nya.

Tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Sasaran yang ditempuh untuk mencapai tujuan

No	Tujuan	Sasaran
1	Peningkatan Tata Kelola Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah.	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan daerah.
2	Peningkatan Fungsi Kelitbangan secara Optimal dan Proporsional dalam Pengambilan Kebijakan Daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang.

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

A. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda Litbang dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu *S – O (Strengths – Opportunity)* yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Adapun untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut Bappeda Litbang menetapkan 2 (dua) strategis, yaitu:

1. Melaksanakan penyusunan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsistensi dan akuntabel berbasis IT.
2. Meningkatkan pemanfaatan penelitian/kajian dalam pengambilan kebijakan daerah.

B. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Bappeda Litbang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Bappeda Litbang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan hal yang sangat penting dari permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Bappeda Litbang. Adapun kebijakan Bappeda Litbang, yaitu:

1. Peningkatan konsistensi pengendalian dokumen perencanaan melalui SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).
2. Peningkatan partisipasi Perangkat Daerah dalam penentuan tema penelitian/kajian.

III.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 2023

KODE						URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN
1						2
		5	5	5		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.	1					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5	1	1	2	1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5	1	1	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5	1	1	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
5	1	1	2	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
5	1	1	2	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5	1	1	2	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
5	1	1	2	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5	1	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5	1	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5	1	1	2	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5	1	1	2	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
5	1	1	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
5	1	1	2	2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
5	1	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5	1	1	2	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5	1	1	2	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5	1	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	1	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5	1	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
5	1	1	2	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5	1	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5	1	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
5	1	1	2	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan
5	1	1	2	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu

KODE						URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN
1						2
5	1	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	1	1	2	6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5	1	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah
5	1	1	2	7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5	1	1	2	7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5	1	1	2	7	7	Pengadaan Aset tetap Lainnya
5	1	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	1	1	2	8	1	Penyediaan jasa Surat Menyurat
5	1	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5	1	1	2	8	3	Penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan kantor
5	1	1	2	8	4	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor
5	1	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	1	1	2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendara Dinas Jabatan
5	1	1	2	9	2	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5	1	1	2	9	5	Pemeliharaan Mebel
5	1	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5	1	1	2	9	7	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya
5	1	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
5	1	1	2	9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana atau bangunann lainnya
5	1	1	2	9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya
5	1	2				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	2	1		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
5	1	2	2	1	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik
5	1	2	2	1	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
5	1	2	2	1	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
5	1	2	2	1	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
5	1	2	2	1	7	Koordinasi Penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
5	1	2	2	2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2	2	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan pembangunan Daerah
5	1	2	2	2	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD

KODE						URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN
1						2
5	1	2	2	3		Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2	3	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
5	1	2	2	3	2	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
5	1	3	2	3	3	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
5	1	3				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	2	1		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5	1	3	2	1	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5	1	3	2	1	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan perangkat Daerah bidang pemerintahan
5	1	3	2	1	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5	1	3	2	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
5	1	3	2	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5	1	3	2	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
5	1	3	2	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
5	1	3	2	2	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5	1	3	2	3		Koordinasi Perencanaan Bidang infrastruktur dan Kewilayahan
5	1	3	2	3	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5	1	3	2	3	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
5	1	3	2	3	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5	1	3	2	3	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
5	1	3	2	3	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunn Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
5	5	2				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	2	2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
5	5	2	2	2	1	Penelitian dan pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
5	5	2	2	2	5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
5	5	2	2	3		Penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

KODE						URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN
1						2
5	5	2	2	3	2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
5	5	2	2	3	4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, perkebunan dan Pangan
5	5	2	2	4		Pengembangan Inovasi dan Teknologi
5	5	2	2	4	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
Jumlah Program						4 Program
Jumlah Kegiatan						16 Kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan						64 Sub Kegiatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 dituangkan dalam tabel IV.1 Berikut:

Tabel IV.I
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Kabupaten Barito Utara
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Utara

PD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

KODE						URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Cacatan Penting	Prakira Maju Rencana Tahun 2025	
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Rencana Tahun 2024		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5	5	5		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
5.	1					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE KEGIATAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN		100%	7.193.608.500			100%	7.477.768.000
5	1	1	2	1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	24.853.000			100%	25.835.000
5	1	1	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	M.Teweh	2 Dokumen	4.913.000	DAU		2 Dokumen	5.108.000
5	1	1	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	M.Teweh	1 Dokumen	2.788.000	DAU		1 Dokumen	2.898.000
5	1	1	2	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	M.Teweh	1 Dokumen	4.345.000	DAU		1 Dokumen	4.517.000
5	1	1	2	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	M.Teweh	1 Dokumen	3.050.000	DAU		1 Dokumen	3.170.000

KODE							URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Cacatan Penting	Prakira Maju Rencana Tahun 2025	
										Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Rencana Tahun 2024		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	1	1	2	1	5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	M.Teweh	1 Dokumen	4.841.000	DAU		1 Dokumen	5.032.000
5	1	1	2	1	6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	M.Teweh	4 Laporan	4.916.000	DAU		4 Laporan	5.110.000
5	1	1	2	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	4.837.843.000			100%	5.028.938.000
5	1	1	2	2	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	M.Teweh	32 Orang/bulan	4.592.680.000	DAU		35 Orang/bulan	4.774.091.000
5	1	1	2	2	3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	M.Teweh	1 Dokumen	238.128.000	DAU		1 Dokumen	247.534.000
5	1	1	2	2	5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	M.Teweh	1 Laporan	3.164.000	DAU		1 Laporan	3.289.000
5	1	1	2	2	7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	M.Teweh	2 Laporan	1.915.000	DAU		2 Laporan	1.991.000
5	1	1	2	2	8		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	M.Teweh	2 Dokumen	1.956.000	DAU		2 Dokumen	2.033.000
5	1	1	2	5			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	87.707.000			100%	91.172.000
5	1	1	2	5	2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	M.Teweh	1 Paket	35.732.000	DAU		1 Paket	37.144.000
5	1	1	2	5	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	M.Teweh	10 Orang	51.975.000	DAU		10 Orang	54.028.000

KODE							URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Cacatan Penting	Prakira Maju Rencana Tahun 2025	
										Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Rencana Tahun 2024		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	1	1	2	7	7		Pengadaan Aset tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	M.Teweh	0 Unit	0	DAU		0 Unit	0
5	1	1	2	8			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.210.018.000			100%	1.257.814.000
5	1	1	2	8	1		Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	M.Teweh	1 Laporan	4.469.000	DAU		1 Laporan	4.646.000
5	1	1	2	8	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	M.Teweh	1 Laporan	135.135.000	DAU		1 Laporan	140.472.000
5	1	1	2	8	3		Penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	M.Teweh	1 Laporan	10.000.000	DAU		1 Laporan	10.395.000
5	1	1	2	8	4		Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	M.Teweh	1 Laporan	1.060.414.000	DAU		1 Laporan	1.102.301.000
5	1	1	2	9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	229.544.500			100%	238.611.000
5	1	1	2	9	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendara Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	M.Teweh	20 Unit	8.835.000	DAU		20 Unit	9.184.000
5	1	1	2	9	2		Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	M.Teweh	2 Unit	89.637.000	DAU		2 Unit	93.178.000
5	1	1	2	9	5		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	M.Teweh	1 Unit	7.796.000	DAU		1 Unit	8.104.000
5	1	1	2	9	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	M.Teweh	32 Unit	40.439.500	DAU		32 Unit	42.031.000
5	1	1	2	9	7		Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	M.Teweh	0 Unit	0	DAU		0 Unit	0
5	1	1	2	9	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	M.Teweh	1 Unit	51.975.000	DAU		1 Unit	54.028.000

KODE						URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Cacatan Penting	Prakira Maju Rencana Tahun 2025	
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Rencana Tahun 2024		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	1	1	2	9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana atau bangunann lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	M.Teweh	1 Unit	10.000.000	DAU		1 Unit	10.400.000
5	1	1	2	9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	M.Teweh	1 Unit	20.862.000	DAU		1 Unit	21.686.000
5	1	2				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase IKU Renstra Perangkat Daerah yang selaras RPD,		100%				100%	
							Persentase RENJA Perangkat Daerah yang selaras RENSTRA,		100%	1.664.511.000			100%	1.691.216.000
							Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD.		42%				43%	
5	1	2	2	1		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	1.344.148.000			100%	1.358.169.000
5	1	2	2	1	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	M.Teweh	1 Berita Acara	82.314.000	DAU		1 Berita Acara	85.566.000
5	1	2	2	1	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	M.Teweh	1 Berita Acara	40.000.000	DAU		1 Berita Acara	41.600.000
5	1	2	2	1	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	M.Teweh	1 Berita Acara	127.520.000	DAU		1 Berita Acara	132.557.000
5	1	2	2	1	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	M.Teweh	425 Usulan	104.612.000	DAU		430 Usulan	108.744.000
5	1	2	2	1	7	Koordinasi Penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	M.Teweh	4 Dokumen	989.702.000	DAU		4 Dokumen	989.702.000
5	1	2	2	2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Data Pembangunan Daerah yang Dimutakhirkan		100%	94.833.000			100%	98.578.000

KODE							URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Cacatan Penting	Prakira Maju Rencana Tahun 2025	
										Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Rencana Tahun 2024		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	1	2	2	2	1		Analisis Data dan Informasi Perencanaan pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	M.Teweh	1 Dokumen	63.657.000	DAU		1 Dokumen	66.171.000
5	1	2	2	2	2		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	M.Teweh	36 Orang	31.176.000	DAU		36 Orang	32.407.000
5	1	2	2	3			Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	165.530.000			100%	172.069.000
5	1	2	2	3	1		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	M.Teweh	1 Laporan	35.678.000	DAU		1 Laporan	37.087.000
5	1	2	2	3	2		Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	M.Teweh	1 Kerja Sama	5.191.000	DAU		1 Kerja Sama	5.396.000
5	1	3	2	3	3		Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	M.Teweh	12 Laporan	124.661.000	DAU		12 Laporan	129.586.000
5	1	2	2	4			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Daerah		100%	60.000.000			100%	62.400.000
5	1	2	2	4	1		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	M.Teweh	1 Dokumen	20.000.000	DAU		1 Dokumen	20.800.000
5	1	2	2	4	2		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	M.Teweh	1 Dokumen	20.000.000	DAU		1 Dokumen	20.800.000
5	1	3	2	4	3		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota	M.Teweh	1 Dokumen	20.000.000	DAU		1 Dokumen	20.800.000

KODE						URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Cacatan Penting	Prakira Maju Rencana Tahun 2025	
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Rencana Tahun 2024		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	1	3				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase IKU Renstra Perangkat Daerah yang selaras RPD, Persentase RENJA Perangkat Daerah yang selaras RENSTRA, Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD.		100% 100% 42%	896.714.500			100% 100% 43%	669.528.000
5	1	3	2	1		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100%	106.765.000			100%	110.982.000
5	1	3	2	1	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	M.Teweh	1 Dokumen	36.264.000	DAU		1 Dokumen	37.696.000
5	1	3	2	1	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan perangkat Daerah bidang pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	M.Teweh	2 Laporan	28.483.000	DAU		2 Laporan	29.608.000
5	1	3	2	1	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	M.Teweh	1 Dokumen	42.018.000	DAU		1 Dokumen	43.678.000
5	1	3	2	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		100%	515.500.000			100%	273.245.000

KODE						URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Cacatan Penting	Prakira Maju Rencana Tahun 2025	
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Rencana Tahun 2024		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	1	3	2	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	M.Teweh	2 Dokumen	320.000.000	DAU		2 Dokumen	70.000.000
5	1	3	2	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	M.Teweh	2 Laporan	20.500.000	DAU		2 Laporan	21.320.000
5	1	3	2	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	M.Teweh	1 Laporan	150.000.000	DAU		1 Laporan	155.925.000
5	1	3	2	2	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	M.Teweh	1 Dokumen	25.000.000	DAU		1 Dokumen	26.000.000
5	1	3	2	3		Koordinasi Perencanaan Bidang infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100%	274.449.500			100%	285.301.000
5	1	3	2	3	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	M.Teweh	1 Dokumen	36.382.000	DAU		1 Dokumen	37.819.000
5	1	3	2	3	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	M.Teweh	1 Laporan	20.790.000	DAU		1 Laporan	21.612.000
5	1	3	2	3	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	M.Teweh	1 Dokumen	46.777.500	DAU		1 Dokumen	48.625.000
5	1	3	2	3	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	M.Teweh	1 Laporan	150.000.000	DAU		1 Laporan	155.925.000

KODE							URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Cacatan Penting	Prakira Maju Rencana Tahun 2025	
										Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Rencana Tahun 2024		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	1	3	2	3	7		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	M.Teweh	2 Laporan	20.500.000	DAU		2 Laporan	21.320.000
5	5	2					PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Litbang yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan		100%	371.851.000			100%	382.634.000
5	5	2	2	1			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		100%	125.000.000			100%	126.000.000
5	5	2	2	1	5		Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	M.Teweh	1 Laporan	25.000.000	DAU		1 Laporan	26.000.000
5	5	2	2	1	12		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola dengan Baik	M.Teweh	1 Laporan	100.000.000	DAU		1 Laporan	100.000.000
5	5	2	2	2			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		100%	66.767.000			100%	69.437.000
5	5	2	2	2	1		Penelitian dan pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	M.Teweh	0 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	10.033.000
5	5	2	2	2	5		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	M.Teweh	1 Dokumen	66.767.000	DAU		1 Dokumen	59.404.000
5	5	2	2	3			Penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi		100%	80.272.000			100%	83.443.000
5	5	2	2	3	2		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	M.Teweh	1 Dokumen	80.272.000	DAU		1 Dokumen	73.443.000

KODE						URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Cacatan Penting	Prakira Maju Rencana Tahun 2025	
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Rencana Tahun 2024		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	5	2	2	3	4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	M.Teweh	0 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	10.000.000
5	5	2	2	4		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi		100%	99.812.000			100%	103.754.000
5	5	2	2	4	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	M.Teweh	1 Laporan	99.812.000	DAU		1 Laporan	103.754.000
										10.126.685.000				10.221.146.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja PD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. RKPD Tahun 2024 disusun dengan Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah (PD) 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026.

Rencana ini akan dijadikan sebagai perdoman/acuan bagi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan PD Tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh Pegawai/ASN Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara serta peran aktif **Stakeholder** yang bersangkutan.